

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah India untuk mengatasi diskriminasi ganda pasca gerakan Shaheen Bagh melalui pendekatan hukum dan pendidikan. Dari aspek hukum, India telah memiliki sejumlah peraturan dan ketentuan konstitusional yang menjamin kesetaraan, seperti Pasal 15 dan Pasal 21 dalam Konstitusi India serta legislasi pelindung seperti Protection of Women from Domestic Violence Act. Meski demikian, regulasi tersebut belum sepenuhnya menysasar persoalan diskriminasi interseksional yang dialami perempuan Muslim, khususnya karena sistem personal law masih memungkinkan berlanjutnya ketimpangan gender berbasis agama. Dalam aspek pendidikan, pemerintah menerapkan program seperti *Beti Bachao Beti Padhao* dan beasiswa khusus minoritas yang berupaya menjangkau komunitas marginal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan Muslim tetap menjadi kelompok dengan angka partisipasi pendidikan terendah akibat berbagai hambatan kultural dan struktural. Kondisi ini mencerminkan bahwa pendekatan kebijakan yang bersifat universal belum mampu mengakomodasi kompleksitas pengalaman diskriminasi yang bersifat ganda atau berlapis.

Dalam sektor sosial dan ekonomi, pemerintah India meluncurkan berbagai skema seperti *Skill India Mission*, *Stand Up India*, dan *Mahila Samakhya Programme* yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan perempuan, termasuk dari komunitas minoritas. Meskipun kebijakan ini bersifat inklusif secara formal, dalam praktiknya perempuan Muslim masih kesulitan mengakses bantuan ekonomi dan pelatihan keterampilan karena stigma sosial serta keterbatasan mobilitas yang bersumber dari tekanan budaya dan agama. Di sisi lain, pada aspek politik dan representasi, pemerintah telah memberikan ruang afirmasi melalui usulan *Women's Reservation Bill* dan dukungan terhadap partisipasi politik perempuan. Akan tetapi, representasi perempuan Muslim dalam lembaga legislatif nasional dan lokal masih sangat rendah, menunjukkan belum adanya strategi

khusus yang menargetkan perempuan dari latar belakang ganda seperti gender dan agama secara bersamaan. Situasi ini memperlihatkan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai saluran partisipasi, kelompok perempuan Muslim tetap terpinggirkan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.

Dalam konteks upaya berskala global, India telah menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi berbagai perjanjian internasional, seperti CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dan SDGs (Sustainable Development Goals), serta terlibat dalam berbagai forum internasional yang membahas kesetaraan gender. Akan tetapi, ratifikasi CEDAW belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi kebijakan yang berbasis prinsip-prinsip interseksionalitas yang menjadi fondasi dalam memahami diskriminasi ganda. Pasal-pasal dalam CEDAW, seperti Pasal 2 tentang kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi serta Pasal 5 tentang peran budaya dan stereotip gender, seharusnya dapat menjadi dasar untuk mendorong kebijakan yang lebih kontekstual terhadap realitas perempuan Muslim di India. Namun dalam praktiknya, pemerintah India masih cenderung menggunakan pendekatan formalistik yang menyamaratakan persoalan perempuan, tanpa memperhitungkan identitas agama dan sosial sebagai faktor yang saling beririsan. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip CEDAW dan pendekatan interseksional dalam kebijakan nasional menjadi sangat penting untuk mengatasi akar diskriminasi struktural dan kultural terhadap perempuan Muslim.

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai kebijakan dan program yang secara formal bertujuan untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan, namun perempuan Muslim di India masih menghadapi hambatan berlapis yang tidak cukup diakomodasi dalam kebijakan negara. Ketiadaan perspektif interseksionalitas dalam perumusan dan implementasi kebijakan telah mengakibatkan perempuan Muslim tetap berada dalam posisi termarginalkan, baik dalam aspek hukum, pendidikan, ekonomi, sosial, maupun politik. Selain itu, keberadaan struktur sosial konservatif seperti sistem patriarki, kasta, dan islamofobia turut memperkuat eksklusi mereka dari akses terhadap hak-hak dasar.

Gerakan Shaheen Bagh menjadi momentum penting yang merepresentasikan resistensi perempuan Muslim terhadap diskriminasi struktural, namun respons negara belum menunjukkan transformasi kebijakan yang substantif. Oleh karena itu, implementasi CEDAW harus diperkuat dengan kebijakan berbasis interseksionalitas yang mampu memahami dan menjawab kerentanan ganda yang dihadapi oleh kelompok perempuan Muslim di India.

## 6.2 Saran

### 6.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan temuan mengenai diskriminasi ganda yang dialami kelompok perempuan Muslim dan kesenjangan implementasi CEDAW, penelitian ini mengajukan beberapa saran praktis bagi pemangku kepentingan terkait. Pemerintah India perlu merevisi dan mengadopsi kebijakan serta undang-undang yang secara eksplisit mengakui dan melindungi individu dari diskriminasi berlapis, tidak hanya berdasarkan gender tetapi juga agama. Ini mencakup penghapusan celah hukum yang memungkinkan diskriminasi ganda terus terjadi dan memastikan kebijakan yang dirumuskan peka terhadap dimensi interseksional. Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran aparat penegak hukum, hakim, dan birokrat melalui pelatihan mengenai konsep interseksionalitas serta hak-hak perempuan Muslim, guna memastikan penegakan hukum yang adil dan non-diskriminatif.

Selanjutnya, organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi memiliki peran krusial dalam memantau implementasi CEDAW dan mengadvokasi hak-hak perempuan Muslim. Mereka dapat memperkuat upaya litigasi strategis, memberikan bantuan hukum, serta meluncurkan kampanye kesadaran publik untuk melawan stereotip dan stigma yang melekat pada perempuan Muslim. Komunitas internasional dan badan-badan PBB juga disarankan untuk terus menekan India agar memenuhi komitmen CEDAW-nya, memberikan bantuan teknis untuk reformasi legislatif dan kapasitas, serta memastikan rekomendasi Komite CEDAW secara spesifik membahas diskriminasi interseksional. Melalui kolaborasi multi-pihak, diharapkan upaya

penghapusan diskriminasi ganda terhadap perempuan Muslim India dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif.

### 6.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini telah menegaskan relevansi dan kekuatan konsep interseksionalitas sebagai alat analisis dalam memahami kompleksitas diskriminasi ganda yang melampaui penjumlahan diskriminasi berbasis identitas tunggal. Temuan bahwa pengalaman diskriminasi perempuan Muslim di India muncul dari titik persimpangan gender dan agama secara spesifik, memperkuat argumen interseksional bahwa kategori identitas tidak dapat dipisahkan dalam menganalisis penindasan. Secara teoritis, studi ini menggarisbawahi perlunya para peneliti Hubungan Internasional, khususnya dalam studi gender dan minoritas, untuk selalu mengadopsi lensa interseksional guna menghindari simplifikasi fenomena diskriminasi yang rumit dan memastikan analisis yang lebih akurat serta komprehensif terhadap kerentanan berbagai kelompok marjinal.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada Teori Implementasi Kebijakan dalam konteks penerapan norma hukum internasional. Dengan menguji faktor-faktor seperti desain kebijakan, kapasitas implementor, dan kemauan politik dalam implementasi CEDAW di India, studi ini menyoroti bagaimana dinamika domestik dapat secara signifikan memengaruhi efektivitas komitmen internasional. Secara spesifik, kasus perempuan Muslim India menunjukkan bahwa faktor-faktor implementasi perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan dimensi interseksional, di mana kurangnya sensitivitas terhadap perpotongan identitas dapat menjadi penghalang utama bagi keberhasilan kebijakan. Hal ini menyarankan bahwa pengembangan teori implementasi perlu lebih jauh mengintegrasikan perspektif interseksional untuk memahami mengapa kebijakan yang bertujuan mengatasi diskriminasi terkadang gagal mencapai kelompok yang paling rentan.